



**PERBANDINGAN KEBIJAKAN KOREA SELATAN ERA LEE MYUNG BAK
DAN PARK GEUN HYE TERHADAP JEPANG TERKAIT ISU KUIL YASUKUNI
SEBAGAI SIMBOL KEJAHATAN PERANG**

Harry Fiqri

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

South Korea and Japan are often involve in dynamics relationship which's effected by the past issue that bind both of them. That issue is about the existence of Yasukuni Shrine, the shrine became controversy because South Korea believe that the shrine represent Japan's brutality during World War II and colonialism were happened. The existence of the Temple stoked tensions and a criticism response from South Korea. Through this issue, South Korea want all of the problem that involve Japan in the past such as Comfort Women, history text books, and the ownership of Dokdo / Takeshima to be settled. The purpose of this study are to compare the foreign policy of Lee Myung Bak and the Park Geun Hye as the President of South Korea towards the issue of Yasukuni Shrine as a symbol of war crimes. Writer uses neo realism perspective for the theory. For the method of research writer uses descriptive analytic and qualitative data analysis. The result of the research explain the similarity of foreign policy by President Lee Myung Bak and President Park Geun Hye and also the difference of foreign policy towards Yasukuni Shrine Issue as the symbolistic of war crime.

Keywords: *South Korea, Japan, Lee Myung Bak, Park Geun Hye, Yasukuni Shrine*

PENDAHULUAN

Korea Selatan dan Jepang memiliki keterikatan sejarah pada masa kolonialisme Jepang pada tahun 1910 sampai pada tahun 1945 yang menduduki wilayah Korea, Tiongkok dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Korea Selatan memperoleh kemerdekaan setelah kekalahan Jepang pada perang dunia II. Hubungan antara Korea Selatan sudah membaik bahkan menjalin hubungan bilateral. Namun, masyarakat Korea Selatan masih memiliki rasa kebencian terhadap Jepang, hal ini terkadang muncul jika terjadi beberapa kasus yang menyinggung perasaan Korea Selatan secara historis. Dalam hal ini Korea tidak takut untuk memberikan kecaman terhadap keberadaan Kuil Yasukuni tersebut bahkan Presiden Korea yang sedang menjabat saat ini Park Geun Hye memberikan kecaman terhadap kunjungan yang dilakukan Perdana Menteri Abe pada tahun 2013 lalu, Geun-hye menyebut kunjungan itu tak ubahnya "menggali luka masa lalu".

Kuil Yasukuni merupakan bangunan keagamaan masyarakat Jepang yang berdiri sejak era *Shinto state*. Tempat ini menjadi bangunan penghormatan bagi para pejuang perang Jepang yang gugur dalam medan perang. Tujuan dari keberadaan Kuil ini adalah untuk menempatkan keberadaan para pejuang perang karena dianggap telah berani berkorban demi kejayaan Jepang (yasukuni.or.jp). Bagi Jepang Kuil ini merupakan

bangunan yang sakral dan sangat dijunjung tinggi juga dihormati. Namun tidak bagi Korea Selatan, Kuil ini dianggap sebagai bentuk sikap Jepang yang tidak menghargai para korban ekspansi Jepang pada era peperangan. Hal ini dikarenakan dalam Kuil tersebut beberapa penjahat perang yang dihukum oleh pengadilan Internasional sebagai penjahat perang disemayamkan dan dihormati di Kuil tersebut. Bahkan para penjahat perang tersebut merupakan kategori penjahat perang kelas A atau yang paling berat melakukan kejahatan “*crime against peace*” (www.korea.net, 2013). Kemudian faktor lain yang menjadi sumber kebencian Korea Selatan adalah Kuil ini kerap kali mendapat kunjungan dari para pejabat tinggi bahkan hingga Perdana Menteri Jepang.

Pertentangan keras disuarakan oleh Korea Selatan yang kemudian diikuti oleh Tiongkok. Mereka menganggap tindakan tersebut merepresentasikan bahwa Jepang tidak memikirkan perasaan para korban perang semasa perang dunia II akibat agresi yang dilakukan Jepang pada masa itu. Reaksi akan kebencian terhadap kunjungan tersebut mengalir deras dari Korea Selatan bahkan Tiongkok yang menganggap hal tersebut tidak pantas dan sama halnya seperti mengagung – agungkan penjahat perang yang bertanggung jawab atas rasa sakit yang dialami Korea Selatan selama masa penjajahan Jepang. Namun reaksi tersebut tidak terlalu dipermasalahkan Jepang, kegiatan kunjungan tetap dilakukan beberapa tahun berikutnya mulai dari Perdana Menteri Jepang Ryutaro Hasimoto, kemudian Junichiro Koizumi, hingga Perdana Menteri Shinzo Abe.

Kuil Yasukuni pada awal mulanya bernama Shokonsa yang dibangun di daerah Kudan di Tokyo, Jepang. Pada saat itu Jepang sedang mengalami reformasi historis yang bernama restorasi Meiji. Pembangunan Kuil ini diinisiasi pada tahun kedua pada era pemerintahan Meiji (1869) dan diinisiasi oleh kehendak Kaisar Meiji sendiri pada saat itu. Namun pada tahun 1879, Shokonsa berubah nama menjadi Kuil Yasukuni (Jakub Havliaek , 2009).

Orang Jepang percaya bahwa para pejuang yang diabadikan dalam Kuil tersebut meskipun sudah meninggal, keberadaan mereka tetap sama layaknya dengan orang yang masih hidup. Keberadaan Kuil ini sendiri bagi Jepang sangat mulia yakni demi menghormati leluhur yang berjuang bagi bangsa Jepang. Namun pandangan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Korea Selatan dan Tiongkok. Dimana kedua negara ini merupakan korban ekspansionis Jepang secara masif yang dilakukan pada era perang dunia II. Dalam konflik isu Kuil Yasukuni terdapat kepentingan atau alasan mengapa kunjungan tersebut ditentang, khususnya Korea Selatan. Selain akibat dari kepedihan masa lalu yang diungkit kembali lewat kunjungan simbolik yang dilakukan Jepang terdapat beberapa kepentingan Korea Selatan dalam hal pertentangannya terhadap isu kunjungan Kuil Yasukuni yakni, *comfort wome*, buku sejarah, kunjungan politisi Jepang ke Kuil Yasukuni dan isu kepemilikan pulau Dokdo/Takeshima.

Comfort women merupakan istilah yang diberikan kepada para wanita penghibur tentara Jepang pada masa perang. Para wanita ini diberlakukan secara kejam dengan mengeksploitasi mereka demi memenuhi nafsu para tentara Jepang. Mereka dieksploitasi secara brutal dan dianggap merupakan salah satu bentuk kejahatan perang oleh dunia internasional. Terdapat sekitar 200.000 wanita di Asia telah menjadi korban perbudakan seks tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang dengan kisaran umur 13 – 25 tahun (Ikeda Nobou, 2011). Wanita – wanita yang menjadi korban tersebut sebagian besar merupakan orang - orang Korea, selain itu juga ada Taiwan, Tiongkok, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan wilayah lainnya yang menjadi bagian kekuasaan Jepang pada era penjajahan (www.theglobalist.com, 2016). Isu buku sejarah Jepang mencuat pada tahun 2002, dimana buku ini dianggap kontroversial karena isi dari buku yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran sejarah. Beberapa fakta seperti penghapusan *comfort woman* kemudian fakta Jepang sebagai agresor dan negara – negara yang menjadi korban penjajahan Jepang pada

era perang dunia tidak disebutkan. Kepulauan Liancourt merupakan sengketa kepulauan yang kepemilikannya diperebutkan antara Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan menyebut kepulauan tersebut sebagai Pulau “*Dok*” yang berarti “*Lonely Island*” atau “*Rock Island*” atau biasa disebut sebagai pulau Dokdo, sedangkan Jepang menyebutnya Takeshima, yang sebelumnya dikenal dengan nama Matsushima / pulau yang sangat kecil (Kim, Hee Min, 2011). Di tahun 2008 persengketaan terhadap pulau tersebut oleh dua negara ini semakin panas karena Jepang memasukkan Kepulauan Liancourt sebagai kedaulatan Jepang dalam buku panduan sejarahnya, padahal klaim terhadap pulau tersebut belum diputuskan siapa yang berhak memilikinya.

PEMBAHASAN

Dalam menanggapi keberadaan isu Kuil Yasukuni, masing – masing pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda, baik Presiden Lee maupun Presiden Park. Dalam isu buku sejarah Presiden Lee menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Jepang yang dianggap Lee sebagai “distorsi terhadap fakta kekejaman Jepang selama masa perang Dunia II”. sebagai bentuk kekecewaan akan hal tersebut ia menyampaikannya langsung kepada Perdana Menteri Taro Aso pada saat KTT diadakan di Pattaya Thailand tahun 2009 (www.koreatimes.co.kr, 2009). Kemudian mengenai isu kunjungan pejabat politis ke Kuil Yasukuni, Presiden Lee pada saat yang sama melakukan lawatan langsung ke pulau Dokdo / Takeshima yang menjadi persengketaan Korea Selatan dan Jepang. Sebagai reaksi terhadap kunjungan tersebut, bahkan hal ini dianggap pertama kali dan berani dilakukan oleh Presiden Korea Selatan jika dibandingkan dengan pemimpin – pemimpin sebelumnya. Presiden Lee ingin menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak boleh diremehkan oleh Jepang, sedangkan terhadap isu *comfort women*, belum menemui resolusi konkrit mengenai tanggung jawab dan kompensasi yang diberikan oleh pihak Jepang terhadap para korban. Tindakan yang dilakukan hanya menekan Jepang melalui pernyataan, atau disela – sela forum internasional yang melibatkan Korea Selatan dan Jepang.

Reaksi Presiden Park terhadap isu buku teks sejarah ia menyampaikan bahwa Jepang berniat untuk mendoktrin anak – anak mudanya dengan mewariskan ideologi konservatif lewat buku pelajaran. Karena Presiden Park menganggap buku tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menanggapi hal tersebut, Kementrian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Suzuki Hideo yang merupakan *Chief of Mission* Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Untuk menyampaikan protes terhadap tindakan Jepang yang memuat materi mengenai kepemilikan wilayah Dokdo / Takeshima oleh Jepang dalam buku teks SMA.

Dalam isu kunjungan Kuil Yasukuni hal ini dipicu oleh kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2013 Presiden Park menganggap tidak adanya keinginan dari pihak Jepang untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Menteri Luar Negeri Korea Selatan. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan tetap tegas terhadap isu – isu sejarah yang melibatkan Jepang (www.koreatimes.com, 2013). Kemudian tanggapan Presiden Park terhadap isu *comfort women* ia sangat kecewa melihat bagaimana Jepang sangat lamban dalam menyelesaikan masalah. Melalui pertemuan di sela – sela KTT pemerintah Korea Selatan dan Jepang sepakat akan mengadakan pertemuan *director – general – level* mengenai permasalahan *comfort women* yang disyaratkan oleh Park Geun Hye kepada Jepang dalam membangun kembali hubungan Korea Selatan dan Jepang (www.cfr.org, 2015). Adapun hal yang akan dibahas dari pertemuan tersebut antara lain : pemerintah Jepang akan memberikan kompensasi sebesar satu milyar yen atau sebesar US\$ 8.3 juta terhadap para korban *Comfort Women*, kemudian permintaan maaf harus disampaikan langsung oleh Shinzo Abe sebagai pemimpin tertinggi Jepang (nationalinterest.org, 2015).

Khususnya dalam bidang ekonomi sejauh ini ketegangan Korea Selatan dalam isu ini belum berdampak secara signifikan terhadap hubungan ekonomi kedua negara. Kedua negara tetap sadar bahwa masing – masing negara baik Jepang maupun Korea Selatan adalah negara yang tentunya merupakan partner penting dalam menyokong kepentingan masing – masing negara. Hal ini dapat dilihat bagaimana kedua negara masih menjalin kerja sama dalam ekspor dan impor. Namun dampak dari beradanya isu tersebut merambah pada perusahaan – perusahaan yang berbisnis dengan Korea Selatan dimana vonis dari pengadilan Korea Selatan untuk memberikan kompensasi terhadap perusahaan – perusahaan Jepang akibat dari gugatan yang dibawa oleh pekerja Korea Selatan atas eksploitasi para pekerja Korea Selatan selama perang dunia II. Terdapat kekhawatiran bahwa isu sejarah ini dapat berdampak pada sektor bisnis (Mukoyama, 2014:3). Dampak yang timbul juga merambah pada sektor pariwisata yang ada di Korea Selatan. Merebaknya isu sejarah dan sentimen terhadap Korea Selatan maupun sebaliknya juga berdampak pada jumlah pengunjung ataupun turis khususnya yang berasal Jepang.

Kemudian dampak juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang. keberadaan isu sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak serius menyelesaikan masalah yang ada akibatnya Korea Selatan menganggap Jepang tidak memiliki niat untuk membangun hubungan yang baik, tentu saja hal ini menyebabkan menurunnya peran Jepang bagi Korea Selatan. Jepang tentu saja memperoleh tekanan atas adanya isu tersebut dan dianggap harus menyelesaikan masalah yang serta memperbaiki kenyataan sejarah sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi di masa lalu. Munculnya isu sejarah ini menuntut kedua pemerintah untuk saling berinteraksi dan menyelesaikan masalah. Pemerintah Korea Selatan menuntut pemerintah Jepang agar sadar dan menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab dalam hal ini munculnya isu kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni, kemudian para “*Comfort Women*” agar mendapat kompensasi akibat yang mereka alami dimasa lalu. Masalah ini juga diperburuk dengan adanya klaim seperti status kepemilikan wilayah pulau Dokdo / Takeshima. Tindakan Korea Selatan yang sering melakukan gugatan terhadap isu sejarah juga menyebabkan munculnya perasaan sentimen dan anti terhadap Korea Selatan. Sentimen juga terjadi oleh pihak Korea Selatan yang melihat berlarut – larutnya penyelesaian masalah oleh Jepang, menganggap bahwa pihak Jepang tidak bersungguh – sungguh dan menyesali hal yang telah terjadi dimasa lalu.

Jika melihat tanggapan dan kebijakan dari masing – masing Presiden perbedaan maupun persamaan Kebijakan dua Pemimpin dapat dinilai dari aspek *Decision*, *Behaviour*, dan *Outcome* (Breuning, Marijke, 2007:18-19). Jika memandang dari aspek *Decision* eksternal dan internal (Rosenau,1974:47), Presiden Lee Myung Bak memandang bahwa Jepang merupakan faktor eksternal yang mengganggu kepentingan Korea Selatan. Melihat bagaimana Jepang selalu memancing reaksi yang keras dari Korea Selatan seperti isu buku teks sejarah, kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni, membuat Presiden Lee Myung Bak membuat keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menekan Jepang agar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Korea Selatan. Kemudian Korea Selatan juga ingin menunjukkan hegemoninya bahwa Korea Selatan memiliki kekuatan dan tidak dapat dikesampingkan. Hal itu juga dipandang sama oleh Presiden Park Geun Hye tindakan yang dilakukan Jepang memicu Korea Selatan untuk melakukan kebijakan yang menentang Jepang. Hal ini dapat dilihat bagaimana reaksi Presiden Park ketika kabar ketika Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan penghormatan di Kuil Yasukuni. Untuk faktor internal dapat dilihat bagaimana gelombang protes yang terjadi di masyarakat mempengaruhi keputusan pemerintah. Kedua pemimpin tersebut sama – sama menganut *future – oriented* terhadap Jepang namun mereka juga percaya bahwa sejarah masa lalu Jepang yang kelam terhadap Korea Selatan juga harus diselesaikan (Yanghyeon, 2008:3).

Presiden Park bahkan mengutarakan salah satu prinsip yang ia anut yaitu *Trust Politik* dimana hubungan harus didasarkan pada saling percaya antar negara. dan Jepang harus menunjukkan bahwa ia pantas untuk membangun hubungan dengan Korea Selatan yakni dengan menyelesaikan semua hambatan dan masalah yang ada” (Kim, 2016:7).

Outcome atau hasil merupakan hasil dari tindakan yang diambil berdasarkan pilihan – pilihan yang ada sebelumnya. Adapun *outcome* yang ditentukan oleh kedua pemimpin memiliki kesamaan dan juga perbedaan mengacu pada kondisi atau keadaan yang memaksa keduanya untuk menentukan kebijakan. Kedua presiden masing – masing memiliki *outcome* atau hasil berupa kebijakan. Kebijakan tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan, kedua presiden sejatinya memiliki tanggapan yang sama dalam hal isu masa lalu antara Korea Selatan dan Jepang. Kedua pemimpin tersebut sama – sama memberikan reaksi yang mengecam tindakan Jepang, keduanya membuat kebijakan dengan tujuan agar Jepang tidak mengesampingkan Korea Selatan dan menyelesaikan masalah yang menyangkut kedua negara. Bentuk kebijakan tersebut berupa tekanan – tekanan yang diberikan kepada Jepang hingga tawaran solusi untuk menyelesaikan dengan cara negosiasi atau damai. Dapat dilihat dari kebijakan keduanya seperti menekan Jepang lewat membatalkan kerja sama bilateral kedua negara. Sejatinya keduanya memiliki tujuan yang sama dalam membuat kebijakan yakni ingin menyelesaikan permasalahan yang menghambat keduanya dalam melakukan *cooperation and relation*. Namun yang membedakan adalah bentuk dari kebijakan masing – masing pemimpin.

PENUTUP

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya terkait perbandingan kebijakan Presiden Lee Myung Bak dan Park Geun Hye terhadap isu Kuil Yasukuni dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan juga perbedaan kebijakan dari kedua Presiden tersebut. Persamaan maupun perbedaan kebijakan dapat dilihat dari bagaimana kedua Presiden memandang isu yang ada dan bertindak berdasarkan isu tersebut. Adapun persamaan kebijakan dari Presiden Lee Myung Bak dan Park Geun Hye antara lain sikap maupun prinsip keduanya dalam melakukan normalisasi hubungan bilateral, dimana keduanya menerapkan pendekatan “*Future Oriented Relationship.Comfort Women*” kedua pemimpin memiliki kesamaan yakni menuntut pemerintah Jepang agar bertanggung jawab dan meminta maaf terhadap para korban dengan memberikan kompensasi. Para korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan seksual namun juga mental. Dalam menanggapi isu kunjungan Kuil Yasukuni oleh pejabat politis Jepang.

Presiden Lee Myung Bak maupun Park Geun Hye sama – sama mengecam tindakan tersebut. Presiden Lee menganggap tindakan tersebut menghalangi normalisasi hubungan Korea Selatan – Jepang. Sedangkan Presiden Park bahwa tindakan tersebut tidak bijak dan menggali luka masa lalu Korea Selatan. Keberadaan Kuil ini bertujuan untuk menghormati para pejuang perang Jepang, namun dianggap sebagai simbol pengagungan penjahat perang. Isu selanjutnya adalah mengenai buku teks sejarah Jepang, keduanya mengecam keberadaan buku tersebut yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Bahkan Presiden Park mengatakan hal tersebut berupa bentuk doktrin pemerintah Jepang terhadap generasi mudanya. Konten buku tersebut dianggap tidak sesuai karena tidak menjelaskan kejahatan – kejahatan yang dilakukan Jepang di era kolonial dan juga pengakuan pulau Dokdo / Takeshima secara sepihak oleh Jepang. Sedangkan terhadap isu persengketaan Pulau Dokdo / Takeshima, Presiden Lee maupun Park juga berprinsip tidak membiarkan hal tersebut terjadi.. Lewat prinsip Presiden Park ingin jika tidak ada manipulasi sejarah. Kemudian menanggapi isu kunjungan politisi Jepang ke Kuil Yasukuni meski keduanya mengecam tindakan tersebut namun masing – masing pemimpin memiliki kebijakan berbeda, dimana Presiden Lee menekan Jepang dengan

melakukan kunjungan ke pulau Dokdo / Takeshima yang masih menjadi persengketaan, sedangkan Presiden Park membatalkan rencana *exchange military partnership* antara yang sempat dicanangkan waktu itu.

Selanjutnya terhadap buku sejarah dimana Presiden Lee menekan Jepang dengan membatalkan rencana kerja sama FTA (*Free Trade Agreement*) saat itu, sedangkan Presiden Park mengirim Menteri Luar Negerinya untuk memprotes konten buku tersebut kepada pemerintah Jepang. Kemudian isu *Comfort Women* jika Presiden hanya menuntut Jepang namun tidak ada solusi maupun pertemuan konkrit demi membahas hal tersebut lain halnya seperti yang dilakukan Presiden Park dimana dia mengadakan pertemuan khusus dan membahas isu ini diberbagai forum internasional hingga pertemuan antara pemerintah Korea Selatan Jepang. Presiden Park juga ingin jika kompensasi disampaikan langsung oleh pemerintah Jepang tanpa perantara NGO dan semacamnya.

Dampak dari keberadaan isu tersebut juga dirasakan pada sektor ekonomi, meskipun tidak ada pengaruh secara signifikan karena Korea Selatan tetap sadar bahwa Jepang merupakan partner penting dikawasan. Kemudian juga berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan Jepang, isu juga berimbas pada munculnya sentimen negatif dari masyarakat terhadap Jepang maupun sebaliknya.

REFERENSI

- Breuning, Marijke , 2007, *Foregin Policy Analysis : A Comparative Introduction*, Plagrave Macmillan : New York
- Council Foreign Relation. (2015, Agustus11). *South Korea, Japan, and Wartime Shadows*.Diakses 11 Agustus , 2016, dari, from Council Foreign Relation: <http://www.cfr.org/south-korea/south-korea-japan-wartime-shadows/p36889>
- Ikeda, Nobuo. 2011. *An Introduction to the Comfort Women Issue*. [jurnal on-line] University of California Press on behalf of the Society for the Study of Social Problems
- Kim Heemin and Jinman Cho, (2008). Changing the Cleavage Structure Korea Times (2009, April 12).*Lee Protests Japan's History Distortions*. Diakses 16 Agustus , 2016, from Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2009/04/116_43042.html
- Korea Times . (2013, Desember 30). *President Park Geun-hye denounces Abe's controversial visit*. Diakses 16 Agustus , 2016 dari Korea Times: <http://www.koreatimesus.com/president-park-geun-hye-denounces-abes-controversial-visit/>
- Mukoyama, H. (2014). Impact of a Shaky Japan-South Korea Relationship on Economic Relations —What Should Japan and South Korea Do Now?—. *economic relation South Korea - Japan* , 03.
- Layanan Pusat Informasi Kementrian Budaya, Olahraga dan Pariwisata. diakses 1 juni 2016 : dari www.Korea.net.
- Rosenau, James N 1974. *Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and Method*, Sage Publications, New York
- The Globalist. 2016. *Comfort Women as Political Footbal* ?diakses 10 Juni 2016. dari <http://www.theglobalist.com/south-korea-japan-comfort-women/>
- Yanghyeon, J. (2008). Lee Myungbak Government's Diplomacy on Japan: Tasks and Prospect. *Korea Focus* , 1 - 5.
- Yasukuni Shrine. 2015. *All about Yasukuni Shrine* .diakses 5 juni 2016 <http://www.yasukuni.or.jp/english/about/index.html> _____ . 2015. *Japan and South Korea agree WW2 'comfort women' deal*, <http://www.bbc.com/news/world-asia-19987251>